

PERHUTANAN SOSIAL

Swasta Berpeluang Jadi Offtaker

JAKARTA – Pemerintah sedang menjajaki sejumlah perusahaan untuk menjadi penyerap hasil produksi dari perhutanan sosial serta menelusuri opsi skema pembiayaan yang bisa dieksekusi.

Azizah Nur Alfi
redaksi@bisnis.com

Pada senin (7/8) depan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan mengundang 34 perusahaan berbasis sumber daya alam serta sejumlah perbankan dan lembaga pembiayaan.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hadi Jaryanto mengatakan penyerap atau *offtaker* yang sedang dijajaki di antaranya Giant Great PineApple (GGP), PT Ultrajaya Milk Industry Tbk., dan PT Djarum.

Menurut Hadi, status sebagai *offtaker* akan memudahkan industri memperoleh bahan baku, tanpa harus direpotkan sejumlah biaya.

"Enggak perlu investasi lahan, enggak perlu menyediakan biaya konflik, enggak perlu biaya mengatasi api, pengamanan hutan, tapi bisa dapat bahan baku. Itu yang terjadi, seperti di Finlandia," tuturnya usai memberi paparan tentang Kebijakan Tata Kelola dan Alokasi Sumber Daya Hutan dalam Rapat Kerja Nasional KLHK

2017 di Jakarta, Kamis (3/8).

Hadi mengatakan, pabrik kayu di Jawa terlebih dulu menjadi *offtaker* perhutanan sosial. Kini, pemerintah berupaya membuka pasar lebih besar kepada korporasi swasta untuk menyerap hasil produksi perhutanan sosial.

Langkah ini dinilai dapat mendorong percepatan realisasi perhutanan sosial yang ditarget 12,7 juta ha.

Selain mencari *offtaker*, pemerintah juga akan menghubungkan petani dengan perbankan guna memperoleh kredit usaha rakyat (KUR) sebagai modal kerja.

"Melalui KUR, ada biaya hidup dan bunga yang dijamin nanti diperhitungkan pada waktu panen. Selanjutnya, keuntungan bersih 70% bagi petani, sisanya Perhutani.

REALISASI

Data KLHK menunjukkan, realisasi perhutanan sosial setelah terbitnya Permen LHK No P83/2016 tentang Perhutanan Sosial pada Oktober 2016 hingga Juni 2017 sebesar 400.379 ha, yang banyak tersebar di Kalimantan. Adapun, luas

lahan yang kini dalam proses guna perhutanan sosial sekitar 900.000 ha, yang didominasi melalui skema Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan.

Perhutanan sosial dilakukan melalui skema hutan adat, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan, hutan adat, dan izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial.

Hadi menargetkan realisasi perhutanan sosial dapat mencapai 1 juta ha hingga akhir 2017. Optimisme ini karena dalam kurun 8 bulan dapat terealisasi 400.379 ha.

Menurut dia, percepatan ini karena dukungan 4.700 komunitas dan LSM, serta perbankan melalui KUR. Selain itu, juga didorong semangat masyarakat memperbaiki hidupnya.

"Pelat tapi pasti, perhutanan sosial akan seperti di Finlandia seperti yang disampaikan Presiden," imbuhnya.

Selain itu, KLHK juga segera meluncurkan 14 izin kemitraan seluas 40.000 ha sebagai *pilot project* perhutanan sosial. Sejumlah titik ini diantaranya tersebar di Probolinggo, Pemalang, Bandung, Muara Gembong, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. "Tinggal menunggu presiden kapan waktunya," kata Hadi.

Hadi menyebut anggaran perhutanan sosial sekitar Rp100 miliar untuk mencapai target 300.000 ha. Adapun, realisasinya sebesar 400.000 ha, lebih tinggi dari target yang dipasang.

Ketua Dewan Kehutanan Nasional (DKN) Didik Suharjito mengatakan, perhutanan sosial memberikan akses bagi masyarakat mengusahakan lahan, sekaligus menjadi media bagi pemberdayaan masyarakat.

Namun, tantangan bagi pemerintah adalah bagaimana agar perhutanan sosial dapat sampai tepat sasaran dan tidak menimbulkan konflik.

"Perhutanan sosial sudah *in line* dengan program DKN, sehingga, bagaimana agar ini bisa lebih cepat dan *on the track*. Juga peran DKN bagaimana agar itu berjalan," imbuhnya.

DKN mengusung 8 isu pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan seperti memperbaiki tata kelola hutan dan perhutanan sosial sebagai resolusi konflik lahan. ■

Program Perhutanan Sosial

Capaian akses kelola kawasan hutan

2007–Okt. 2016
636.567 ha

Okt. 2016–Juni 2017
400.379 ha

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
BISNIS/HUSIN PARAPAT

Skema realisasi (Oktober 2016–Juni 2017)

Hutan desa	: 286.234 ha
Hutan kemasyarakatan	: 58.802 ha
Hutan tanaman rakyat	: 26.266 ha
Kemitraan	: 15.655 ha
Hutan adat	: 8.746 ha
Izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial	: 4.674 ha
Total	: 400.379 ha